

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna

Nomor 7 Tahun 2013

Tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Natuna

Abstrak	: <p>Dalam pembinaan jiwa korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, berhimpun dalam satu wadah KORPS dan Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap KORPS Pegawai republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, perlu dibentuk Sekretariat Pengurus KORPS Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Natuna.</p> <p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008;.</li><li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;</li><li>4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004;</li><li>5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004</li></ol>
---------	--

		<p>Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten /Kota;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Natuna.</p>
Hal-hal yang diatur		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bab I mengenai Ketentuan Umum.</li> <li>✓ Bab II mengenai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.</li> <li>✓ Bab III mengenai Susunan Organisasi.</li> <li>✓ Bab IV mengenai Kepegawaian dan Eselon.</li> <li>✓ Bab V mengenai Tata Kerja.</li> <li>✓ Bab VI mengenai Pendanaan.</li> <li>✓ Bab VII mengenai Ketentuan Penutup.</li> </ul>
Masa berlaku	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</li> <li>2. Peraturan ini diundangkan pada 13 Mei 2013.</li> </ol>
Catatan	:	